

## AKADEMI KEPOLISIAN DALAM ERA POLISI SIPIL

Oleh: Sarlito Wirawan Sarwono\*

### Abstract

*Even the Indonesian Police was decreed as an independence unmilitary institution, it should have made efforts to do internal reformation in order to be able to take its new role as police for the civil society. The core reformation is the change in the police mental attitude from militaristic attitude to attitude that expresses police role as defender of law and order and as community protector. One of the strategic point to start such change is police education. This paper tries to explore some possible alternatives to improve the quality of the education for police officers through Police Academy (Akpul) by using social psychology paradigm and by making comparison between the Indonesian police academy with U.S. police academies New York City and New York State. At the end of this article the author gives some suggestions to improve the Indonesian Police Academy by referring to the quality of two US Police Academies.*

### PENDAHULUAN

Sejak Polri dinyatakan mandiri, maka Polri harus mengadakan berbagai pembenahan intern untuk memenuhi perannya sebagai polisi sipil. Inti perubahan itu adalah penggantian sikap mental dari sikap militer ke sikap penegak hukum dan pengayom masyarakat. Sudah barang tentu salah satu titik strategis dari perubahan mental tersebut adalah lembaga pendidikan Polri, khususnya Akademi Kepolisian (Akpul). Makalah ini mencoba menjajagi berbagai kemungkinan penyempurnaan pendidikan calon Perwira Polri melalui Akpul dengan menggunakan paradigma psikologi sosial dan studi banding antara Akpul dengan akademi-akademi Kepolisian di New York City dan New York State AS. Beberapa saran diajukan pada akhir makalah ini setelah melalui serangkaian analisis dan diskusi terhadap data yang terkumpul dari akademi-akademi Kepolisian tersebut di atas.

\* Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

● Pada 17 Agustus 1998 untuk pertama kalinya Presiden B.J. Habibie mencanangkan program kemandirian Polri, yaitu rencana untuk menjadikan Polri terlepas dari organisasi ABRI. Dengan demikian diharapkan Polri bisa lebih memenuhi fungsinya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat tanpa diintervensi oleh berbagai kepentingan luar, termasuk dari pemerintah dan pimpinan ABRI.

● Tekad politik pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan peresmian kemandirian Polri pada 1 April 1999 (Inpres No. 2 /1999) tidak muncul begitu saja atau karena tekanan semangat reformasi masyarakat yang pada masa itu sedang mencuat, melainkan memang sudah lama dirasakan sebagai kebutuhan yang mutlak di kalangan Polri sendiri. Peran Polri sebagai institusi penegak hukum dan pengayom masyarakat selama ini (selama dalam organisasi ABRI) dirasakan tidak bisa berkembang optimal karena peran Polri ini seringkali memang bertentangan dengan peran ABRI (Pertahanan & keamanan, peran sosial-politik/Dwifungsi ABRI dsb). Dalam praktek di lapangan tidak jarang peran Polri ini terpaksa dikalahkan untuk kepentingan lain di luar fungsi Polri (Kasus Udin, kasus Marsinah, Kasus Trisakti dsb). Maka berkembanglah berbagai kegiatan dalam tubuh Polri (seminar simposium, lokakarya rapat kerja, juklak juknis dsb) yang intinya adalah mengusahakan kemandirian Polri untuk meningkatkan fungsinya seoptimal mungkin.

Setelah berbagai kegiatan ke arah kemandirian dilaksanakan (termasuk perubahan organisasi sampai pakaian seragam) ternyata masih terasa bahwa di kalangan anggota Polri sendiri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan fungsi sebagai polisi sipil yang muncul dalam berbagai perilaku seperti sikap masih menunggu perintah, tidak antisipatif, sikap arogan terhadap masyarakat, masih menggunakan tehnik-tehnik interogasi secara fisik dsb. Hakikat dari masalah ini jadinya adalah belum terbentuknya sikap yang dibutuhkan di kalangan anggota Polri sendiri untuk mengemban tugas sesuai dengan perannya yang baru.

Di dalam psikologi, perubahan sikap selalu berawal dari pendidikan dan pelatihan dalam lingkungan Polri. Lembaga pendidikan yang paling strategis untuk pembentukan kesatuan-kesatuan Polri sipil di masa depan sudah barang tentu Akademi Kepolisian (Akpil). Dalam

hubungan itulah diperlukan suatu pengkajian tentang program pendidikan Akpol, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan sikap polisi sipil.

## AKADEMI KEPOLISIAN

Sejauh ini, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak perguruan tinggi (atau institusi penelitian lain di luar ABRI dan Polri) terhadap sistem pendidikan Akpol. Karena itu penelitian Pamuji (1997) merupakan salah satu penelitian perintis yang berhasil mengungkap sebagian dari kehidupan para Taruna Akpol, yang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari situasi pendidikan di akademi tersebut. Dalam penelitian itu Pamuji menemukan bahwa sebagian terbesar dari Taruna Akpol mengalami stres yang sumber-sumbernya adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Sumber-sumber stres Taruna Akpol.

	Muatan
<b>1. Kehidupan Akademik</b>	
Sikap dan perlakuan senior	0,7772
Tindakan fisik oleh senior	0,7492
Peraturan yang ketat	0,7399
Sikap dan perlakuan Pengasuh	0,6993
Latihan lapangan/fisik	0,6587
Penyesuaian saat masuk Akpol	0,6086
Kurikulum Akpol	0,5462
Jadwal kegiatan sehari-hari	0,5208
Perubahan status sipil ke militer	0,4914
Melakukan kesalahan yang berdampak hukuman kelompok	0,4633
Teguran oleh dosen	0,4266
Jumlah waktu istirahat	0,3857

<b>2. Kegiatan Perkuliahan</b>	
Wajib memenuhi standar Akpol	0,7004
Gaya kuliah dosen	0,5846
Nilai yang diberikan oleh dosen	0,5520
Hubungan tidak harmonis antar-Taruna	0,5436
Kurang percaya diri secara intelektual	0,4960

Sikap/perlakuan dosen	0,4789
Ujian kenaikan pangkat	0,3563
<b>3. Hak atas Fasilitas</b>	
Menu makan	0,6625
Hak pesiar dicabut	0,6162
Rindu rekanita	0,5869
Tidak punya rekanita	0,5820
Fasilitas hiburan	0,5708
Uang saku terlambat	0,5691
Kualitas perpustakaan	0,5430

(Sumber Pamuji,1997)

Dari temuan Pamuji di atas tampak bahwa faktor-faktor yang semestinya merupakan sumber stres yang paling utama dalam kehidupan Taruna, yaitu kegiatan perkuliahan dan hak-hak atas fasilitas (muatan stres 0,5430-0,7004) justru masih kalah dibandingkan dengan stres yang ditimbulkan oleh kehidupan akademik khususnya yang datang dari sikap dan perlakuan senior (0,7772) dan tindakan fisik senior (0,7492). Hal ini menunjukkan bahwa di luar kurikulum standar yang berlaku di Akpol yang diberlakukan di bawah komando Gubernur, ada "kurikulum tersembunyi" yang dilaksanakan oleh para Taruna senior terhadap para juniornya.

Dalam survai lapangan yang dilakukan oleh penulis dan tim dari Fakultas Psikologi UI (Sarwono, Meliala & Parsudi 1999) ditemukan bahwa "kurikulum tersembunyi" ini memang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi di kalangan para Taruna. Walaupun hal ini telah menjadi "rahasia umum" (semua orang sudah mengetahuinya termasuk para pimpinan Akademi), tidak ada yang berhasil mengungkap atau membuktikannya karena setiap Taruna yang terlibat bahkan yang menjadi korban (misalnya harus dirawat di rumah sakit) selalu akan tutup mulut (misalnya korban menjawab baru mengalami kecelakaan lalu lintas walaupun luka-lukanya jelas karena pukulan). Keberhasilan tim peneliti UI membuka tabir "kurikulum tersembunyi" tersebut adalah berkat metode partisipasi yang dilakukan oleh tim pengumpul data.

Yang menjadi masalah adalah apakah para Taruna dapat melaksanakan tugas belajarnya dalam keadaan tertekan seperti itu? Sementara itu, berbagai pengamatan terhadap pelaksanaan tugas Polri sehari-hari di lapangan menunjukkan bahwa anggota Polri harus menanggung beban mental yang berat akibat sifat pekerjaan yang berat ditambah dengan berbagai faktor yang di luar kendali Polri sendiri dan tidak ditunjang oleh situasi serta sarana kerja kondusif (Sarwono 1996). Dengan demikian dapatlah diperkirakan bahwa kinerja Polri akan dirasakan belum optimal oleh masyarakat sebagaimana terungkap dalam hasil survai yang dilakukan oleh Laboratorium FISIP UI (1996).

Tabel 2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Polisi (Jakarta + luar Jakarta)

Tingkat Kepercayaan	Jumlah	Presentase
Rendah	319	27,5 %
Sedang	505	43,5 %
Tinggi	337	29,0 %
<b>Total</b>	<b>1161</b>	<b>100 %</b>

(Sumber Pamuji 1997)

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi yang masih rendah tersebut di atas besar sekali kemungkinannya ada kaitannya dengan tekanan yang berat yang dialami bukan saja oleh para Taruna di Akademi dan anggota Polri sebagai perorangan dalam tugasnya di lapangan, namun juga oleh organisasi Polri itu sepanjang sejarahnya. Di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Polisi menjadi alat pemerintahan penjajahan, sedangkan dalam era lama Polri beberapa kali berganti induk (Menteri Dalam Negeri, Presiden, Perdana Menteri dsb) untuk akhirnya menjadi bagian dari ABRI (sejak 1963) yang berlanjut terus sampai akhir masa Orde Baru dan baru berganti sejarahnya Polri sipil lagi pada era reformasi saat ini. Dengan demikian, sepanjang sejarahnya Polri pernah berfungsi sebagai polisi sipil hanya

pada awal periode Kemerdekaan saja (sejak tahun 1947 pun Polisi sudah dimiliterisir atas dasar UU keadaan Bahaya, lihat Koenarto 1997:104).

Karena fungsi militer yang represif memang bertentangan dengan dua fungsi kepolisian, yaitu penegakan hukum dan mengayomi masyarakat (memelihara keamanan serta ketertiban umum) maka dapat dipastikan bahwa Polri tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik selama masih berada dalam lingkungan ABRI. Dalam hubungannya dengan proses pendidikan di Akpol, terlihat bahwa mata ajaran kemiliteran (fisik, doktrin-doktrin dsb) sangat mendominasi kurikulum Akpol, sehingga hampir-hampir tidak ada waktu lagi untuk mendidik Taruna dalam ketrampilan-ketrampilan teknis kepolisiannya itu sendiri. Dampaknya adalah Perwira-perwira lulusan Akpol yang tidak siap pakai di lapangan (Akademi Kepolisian, 1999).

Dalam hubungan inilah perlu dikaji proses pendidikan di Akademi Kepolisian lain di luar negeri, agar dapat dijadikan bahan perbandingan.

### **AKADEMI KEPOLISIAN NEW YORK**

Berdasarkan perintah Kapolri, telah ditugaskan kepada sebuah tim yang diketuai oleh Gubernur Akpol untuk mengadakan studi banding ke New York USA (27 April – 2 Mei 1999) dengan sasaran :

1. New York City Police Academy (NYCPA).
2. New York State Police Academy (NYSPA).
3. John Jay College City University of New York (JJ College).

Tujuan utama dari studi banding ini adalah untuk memberi bahan masukan bagi pengembangan kurikulum Akpol sipil yang mandiri sebagai tindak lanjut dari pemisahan Polri-ABRI. Di samping itu, penelitian ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan sistem pendidikan di lingkungan Polri yang terkait dengan perencanaan sistem administrasi kepolisian secara umum.

## TEMUAN – TEMUAN

### A. *New York Police Dept. (NYPD).*

Sejak NYPD dimulai pada tahun 1625 ketika New York masih bernama New Amsterdam dan dikuasai oleh perusahaan dagang Belanda (West India Company), perusahaan menunjuk seorang *Sheriff* yang bertugas menjaga ketertiban umum dan keamanan milik perusahaan. Pada tahun 1643 dibentuk pasukan patroli pertama (*Burgher Guard*) yang pada tahun 1658 berkembang menjadi patroli polisi profesional (*Rattle Watch*). Tahun 1664 New Amsterdam beralih ke tangan Inggris dan berubah nama menjadi New York. Pada tahun 1693 polisi NY pertama kali mengenakan seragam. Masa 1700-1800 saat keadaan perang, keamanan ditangani tentara. Pada waktu tugas keamanan kembali ke polisi pada tahun 1800, NYPD menggunakan kepolisian London sebagai model. Sejak 1830 sampai sekarang tugas NYPD menjadi semakin sulit karena harus melayani masyarakat kota metropolitan yang berbudaya campuran.

Pelatihan untuk anggota polisi (*Burgher Guard*) telah dimulai sejak 1643, tetapi pendidikan yang lebih formal (*Police Training School*) baru dilaksanakan sejak 1914, pada 1923 sekolah polisi ini diubah menjadi *Police College* dan tahun 1934 menjadi *Police Academy*. Sejak 1955 dikembangkan kerja sama dengan City University of New York (CUNY) untuk pengembangan ilmu kepolisian dan kriminologi (didirikan John Jay College di CUNY) serta untuk memberi kesempatan bagi anggota-anggota polisi yang berbakat untuk melanjutkan pendidikan sampai mendapat gelar master dan Ph.d (lulusan NYCPA diberi sejumlah kredit tertentu).

Kebijaksanaan NYPD dikendalikan oleh seorang Commissioner (sipil) yang ditunjuk oleh Walikota NY, sedangkan komando pelaksanaan dipegang oleh seorang Chief (polisi kurir). Selain anggota-anggota polisi (berseragam dan nonseragam), NYPD didukung oleh pegawai-pegawai sipil (dokter, ahli laboratorium, sekretaris dsb).

Saat ini NYPD beranggotakan 40.000 personel untuk melayani masyarakat New York City yang berjumlah 12 juta (pada siang hari). Jenjang kepangkatan mulai dari yang paling rendah adalah sebagai berikut: Officer, Sargeant, Leutenant, Captain, Deputy Inspector. Inspector, Deputy Chief dan Chief (1-4 stars chief).

New York City Police Academy (NYCPA) dipimpin oleh seorang Deputy Commissioner (sipil) dan seorang komandan berpangkat Chief. Tujuan pendidikan di NYCPA adalah untuk menghasilkan petugas (Officers) yang berdedikasi dan bermotivasi untuk melayani masyarakat dan bersama-sama masyarakat memecahkan persoalan-persoalan masyarakat.

NYCPA memberikan pendidikan dasar (6 bulan) kepada rekrut baru (calon polisi) maupun pelatihan lanjutan kepada anggota-anggota polisi yang sudah bertugas di lapangan (*inservice training*). Dengan demikian NYCPA merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di lingkungan NYPD. Untuk itu NYCPA menyediakan 80 macam kursus, pelatihan dan pendidikan (2 hari sampai 3 minggu) untuk berbagai jenis kejuruan, ketrampilan dan kepangkatan.

Pencabangan di NYPD adalah Patrolman, Detective dan special task force.

Fungsi lain dari NYCPA adalah sebagai lembaga penghubung dengan perguruan tinggi.

Persyaratan untuk menjadi siswa NYCPA adalah sudah mengikuti pendidikan tinggi minimal 2 tahun atau sudah memiliki 60 SKS (sebagian sudah mempunyai gelar Bachelor dan rasio penerimaan adalah 1 : 8). Selama masa pendidikan dasar (6 bulan) siswa berstatus sebagai Probationary Police Officer (PPO) atau polisi percobaan, setelah lulus ia pun masih dikenai masa percobaan 3 tahun. Siswa NYCPA per angkatan (@ 6 bulan) adalah 1.000 orang

Kurikulum pendidikan *officer* di NYCPA hanya terdiri dari 4 mata kuliah :

1. Ilmu kepolisian (*Police Science*): sistem dan prosedur kepolisian, sistem dan prosedur patroli, etika kepolisian, komunikasi radio, menulis laporan, penyidikan awal, teknik dan taktik kepolisian lainnya (150 jam).
2. Hukum (*Law*): Konstitusi, HAM, Sistem peradilan kriminal, struktur pengadilan proses pembuktian, SQF (*Stop, Question and Frisk*), Penggeledahan dan penangkapan (160 jam).
3. Ilmu Perilaku (*Behavioral Science*): Komunikasi yang efektif, pengetahuan tentang budaya (sikap prasangka, mitos, rasialisme, seksisme, imigran, agama, homo, wadam), kesehatan mental,



intervensi krisis (pelanggaran hak milik, kekerasan rumah tangga, narkoba, seks, remaja, orang jompo dsb) (130 jam).

4. Pendidikan fisik (*Physical exercise*) : baris-berbaris, kesamaptaaan, P3K, mengemudi, penyelamatan di air, bela diri, taktik dan teknik senjata (149 jam).

**B. New York State Police (NYSP)**

NYSP didirikan pada tahun 1917 (jauh lebih muda dari NYPD) oleh dua orang ibu rumah tangga yang suaminya menjadi korban kejahatan dan tidak mendapat perlindungan dari aparat keamanan. Status NYSP berada di bawah kendali Gubernur New York dan daerah hukumnya meliputi seluruh negara bagian New York termasuk New York City. Karena itu NYSP mempunyai kantor dan petugas juga di NY City. Hal ini bisa menyebabkan tumpang tindih tugas akan tetapi selalu bisa diatasi dengan koordinasi yang baik antarinstansi. Tumpang tindih juga sering terjadi juga dengan polisi-polisi lokal (*country/town sheriff/police*) namun bisa diatasi dengan koordinasi yang baik. Koordinasi juga dilakukan dengan polisi federal (FBI).

Salah satu keunggulan NYSP adalah Laboratorium Forensik yang merupakan salah satu yang terbaik di AS.

Tujuan NYSP adalah menjaga keamanan dan ketertiban (termasuk jalan-jalan raya di luar pusat perkotaan). Untuk melaksanakan tugas itu jumlah anggota (disebut *trooper* karena awalnya adalah pasukan berkuda) saat ini adalah 4.000 orang yang melayani wilayah setengah pulau Jawa (sepersepuluh jumlah anggota NYPD).

Untuk meliput wilayah seluas itu NYSP dilengkapi dengan mobil patroli, helikopter dan kapal/perahu. Jenjang kepangkatan mulai dari yang terendah adalah sebagai berikut: Trooper Sargeant, Chief Sargeant, Leutnant, Captain, Major (pangkatnya Komandan NYSP) Assistan Deputy Superintendent, First Deputy Superintendent (komandan NYSP).

Pencabangan fungsi Kepolisian adalah sebagai berikut: Pasukan berseragam (*Uniformed force*). Detektif (*Bureau of Criminal Investigation*) dan pelayanan khusus penyelam perairan, udara, negosiasi krisis, kecelakaan, narkoba anak dan remaja, rumah tangga.

NYSPA ( NY State Police Academy) maksimum mendidik 200 siswa (semester ini 162 termasuk 4 wanita) per angkatan (@ 6 bulan masa studi). Selain itu NYSPA juga mengadakan pendidikan dan latihan bagi *troopers* yang sudah aktif (*in service training*). Waktu belajar adalah Senin-Jum'at jam 08.00 – 17.00. Akhir pekan bebas. Siswa (rekrut maupun *in service*) diasramakan, tetapi pakaian seragam hanya diwajibkan pada waktu belajar. Untuk rekrut baru diharuskan mengenakan baju sipil (jas dan dasi selama 3 minggu pertama masa pendidikan). Penindakan disiplin hanya dengan teguran lisan dan evaluasi tertulis serta tindakan administratif tanpa pemukulan atau tekanan fisik lainnya.

Persyaratan masuk minimal sudah mencapai 60 SKS di pendidikan tinggi, 30 SKS bagi yang sudah wajib militer. Kurikulum terdiri dari 4 mata pelajaran:

1. Orientasi kepolisian (*Police Orientation*) : peraturan dan ketentuan kepolisian, pengantar penegakan hukum dan pemerintahan.
2. Keterampilan kepolisian (*Police Skills*) : latihan fisik, bela diri, penerima berita pertama (*first responder*), mengemudi, senjata api, dsb.
3. Ilmu Kepolisian (*Police Science*) : konstitusi, hukum pidana, hukum acara pidana, interogasi, hukum-hukum khusus, UU-Peraturan lalu lintas dan jalan raya, kekerasan rumah tangga.
4. Ilmu perilaku (*Behavior Science*).

NYSPA bekerja sama dengan State University of New York (SUNY) untuk kelanjutan studi anggota-anggotanya yang berbakat.

#### C. John Jay College

John Jay College adalah lembaga pendidikan dan penelitian ilmu kriminologi yang terbaik di AS. Lembaga ini didirikan pada tahun 1955 oleh CUNY (City University of New York) dengan bekerja sama dengan NYCPA. Nama yang dipilih adalah nama seorang pengacara New York yang terkenal John Jay (1745 – 1829). Semua JJ College bertempat di gedung NYCPA, tetapi sejak tahun 1970 JJ menempati

gedungnya sendiri.

Saat ini JJ College mempunyai 10.000 mahasiswa, termasuk 1.000 orang mahasiswa master dan 150 mahasiswa Ph.D.

Perpustakaan kriminologi JJ College adalah salah satu yang terbaik di AS.

Untuk anggota-anggota NYPD disediakan kelas-kelas khusus di NYCPA dengan jam-jam khusus pagi atau malam (sebelum dan sesudah jam dinas).

Sebagai pengajar JJ College adalah mantan polisi yang sudah bergelar Ph.D.

Program-program Master yang ditawarkan :

1. MA in Criminal Justice
2. MA in Criminal Psychology
3. Master in Public Relation
4. MSc in Forensic Science
5. MSc in Protection Management

Masa studi program Master adalah 2 tahun, untuk PhD selama 3 – 4 tahun (mahasiswa full – time). Uang kuliah \$ 3.800 per semester.

#### *D. Perbandingan AKPOL dengan Akademi Polisi NYPD dan NYSP.*

Perbandingan antara temuan-temuan di Akpol dan Akademi-Akademi Kepolisian di NY City maupun di NY State disimpulkan dalam tabel 3.

## **DISKUSI**

Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara Akpol dan Akademi-akademi di NY adalah dalam Tujuan Instruksional Umum (TIU)-nya. NYCPA/NYSPA bertujuan untuk mendidik polisi profesional bertaraf pelaksana (menguasai teknis/taktis kepolisian) sedangkan Akpol, walaupun tetap bertujuan untuk menghasilkan personel polisi profesional, lebih menekankan kepada tujuan untuk mendidik calon perwira generalis, *first line supervisor* dan ilmuwan. Karena itu kurikulum NYCPA/NYSPA sangat

Tabel 3 : Perbandingan Akpol dengan Akademi-Akademi Kepolisian  
(Gadik New York.)

No	ASPEK	Akademi-Akademi Kepolisian New York	AKPOL
1.	Prasyarat	Mendidik <i>patrolman</i> yg profesional	SMA
2.	Lama pendidikan Persyaratan		Mendidik calon perwira yang berkode etik. Profesional, berjasmani samapta, mampu mengembangkan ilmu kepolisian dan mampu sebagai <i>first line supervisor</i> .
3.	Lama pendidikan	6 bulan	3 thn + 1 thn sebagai perwira siswa
4.	Persyaratan	80 sks/kuliah 2 tahun	SMU
5.	Mata kuliah	3 – 4 Mata Kuliah	48 Mata Kuliah
6.	Isi mata kuliah	Ketrampilan Tehnis/taktis Kepolisian	Mata kuliah umum, MK dasar keahlian
7.	Tenaga pendidik (Gadik)	1.Polisi yang berbakat dan mau berkarir sebagai instruktur 2.Dosen PT. luar	1.Perwira yang ditunjuk. Baru loncatan kenaikan pangkat 2.Dosen PT. luar
8.	Pendapatan di Gadik (take home pay/income)	Sama dengan <i>Patrolman/trooper</i>	Jauh lebih rendah dari petugas lapangan.
9.	Pendidikan lanjutan	1.Hanya di Akademi 2.2 – 4 hari sampai 3 minggu	1.Di berbagai Lemdik (termasuk di PTIK) 2. 3 bulan, 2 tahun
10.	Hubungan dengan PT	CC. College/SUNY	UNDIP, UI, dll
11.	Masa percobaan	1.Sebagai siswa 6 bulan 2.Sebagai Polisi 1-3 tahun	Tidak ada
12.	Asrama	1. NYCPA, tanpa asrama 2. NYSPA, asrama, Senin s/d Jum'at	Selalu di asrama (kecuali hari libur)
13.	Seragam	Hanya pada jam pelajaran	24 jam setiap hari selama masa pendidikan.

sederhana (4-5 mata pelajaran) dan singkat (6 bulan) serta juga bersifat teknis-taktis saja, sementara kurikulum Akpol (3 tahun) lebih banyak teori, doktrin dan tata laksana (manajemen), bukan pelaksanaan tugas kepolisian. Bahkan dalam kurikulum yang masih berlaku sampai sekarang, muatan pendidikan militernya sangat besar dan dari hasil survai di Akpol sendiri ditemukan "kurikulum tersembunyi" yang militeristik. Hasilnya adalah perwira-perwira lulusan Akpol yang berkebiasaan TNI dan berorientasi ke masa depan dan ke atasan (sesuai dengan aspirasi diri mereka sendiri), kurang memperhatikan fungsi dan tugas polisi yang sesungguhnya.

Instruktur-instruktur di NYCPA/NYSPA sangat bermotivasi dan profesional, karena mereka dipilih dari petugas-petugas yang berkualitas tinggi (ditinjau dari prestasi di lapangan dan dites/diwawancarai) di antara petugas-petugas yang secara sukarela (melalui surat lamaran) menyatakan diri siap untuk menjadi tenaga pendidik (Gadik) di Akademi Kepolisian. Mereka yang terpilih menjadi gadik merasa bangga akan jabatannya sebagai instruktur karena merupakan pilihannya sendiri, mendapat kehormatan sebagai gadik dan penghasilannya tidak berbeda dari polisi yang bekerja di luar. Kerja sama dengan perguruan tinggi juga memberi manfaat. Selain akademi bisa meminjam tenaga dosen dari PT, juga dimungkinkan bagi petugas yang ingin meningkatkan gelarnya atau menjadi dosen profesional di akademi maupun di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan kondisi di Akpol karena para gadik dan perwira pembimbingnya kebanyakan menggunakan Akpol sebagai batu loncatan untuk naik pangkat/jabatan. Bahkan personel Akpol ditempatkan di lembaga pendidikan tersebut sebagai hukuman (Sarwono, dkk., 1999).

Sistem pendidikan yang sangat efisien di NYCPA/NYSPA disebabkan juga oleh adanya dukungan sarana/prasarana yang mencukupi di satu pihak, sedangkan di pihak lain adanya sistem administrasi kepolisian yang sangat sederhana. Jenis kejuruan kepolisiannya juga sederhana, hanya terdiri dari (1) *patrolmen* (NYPD) atau *uniformed trooper* (NY State), (2) Detektif dan (3) Tim tugas-tugas khusus (*task forces*), termasuk SWAT, penjinak bom, narkotika, penyelam, perairan, udara, anak/remaja, dsb. Jenjang kepangkatan juga sederhana; (1) Officer (NYPD)/*trooper* (NYSP), (2) Sersan, (3) Letnan,

(4) Kapten dan (5) Mayor. Pangkat-pangkat di atasnya berkait dengan jabatan dan merupakan pangkat/jabatan penunjukan.

## SARAN

Untuk mencapai fungsi dan citra polisi sipil yang efektif dan efisien sebagaimana dikehendaki masyarakat, peran lembaga pendidikan Polri, khususnya Akpol, sangat menentukan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perubahan mendasar pada program pendidikan Akpol.

Pertama sekali adalah sifat pendidikan Akpol harus nonmiliter, iklim sipilnya perlu dibuat menonjol (berpakaian sipil di luar jam pelajaran, libur pada akhir pekan dan bebas keluar dari asrama, tidak ada penindakan fisik, dsb). Di pihak lain kedisiplinan baris-berbaris, bela diri dsb yang diperlukan oleh polisi sebagai organisasi yang berdisiplin dan berhierarki ketat dibentuk melalui pelajaran latihan-latihan fisik dan pengawasan ketat dari atasan serta penjatuhan sanksi yang tegas dan konsisten (termasuk pemecatan) terhadap setiap pelanggaran.

Mata pelajaran perlu dipadatkan dan disederhanakan (menjadi 4 – 5 mata pelajaran saja). Ketrampilan kepolisian perlu diajarkan secara rinci, pelajaran-pelajaran teori dikurangi, sedangkan latihan kemiliteran dihapuskan.

Masa pendidikan dipersingkat, sehingga siswa bisa langsung bekerja sebagai polisi profesional yang menguasai teknis dan taktis kepolisian tetapi *in service training* dibuat lebih banyak dan dipadatkan waktunya. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan penduduknya yang sangat beragam kebudayaannya maka pendidikan *in service* perlu dikembangkan di daerah-daerah.

Kesempatan untuk menjadi tenaga ilmuwan, pendidik dan peneliti bagi anggota-anggota polisi yang berminat dan berbakat dapat dikembangkan melalui pendidikan kesarjana yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (seperti yang sudah terjadi pada PTIK-UI). Dengan demikian PTIK tidak lagi menjadi jalur struktural (untuk naik pangkat/jabatan), melainkan merupakan jalur fungsional (kenaikan pangkat sesuai dengan fungsinya sebagai gadik atau peneliti).

Kesejahteraan dan kebanggaan sebagai korps gadik dan perwira pembina perlu ditingkatkan dengan mengembangkan gadik-gadik dan

perwira-perwira karier dan bekerja *full time* di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Akpol.

Tetapi untuk mencapai hal itu semua, diperlukan sistem administrasi, prosedur dan organisasi Polri yang kondusif untuk meningkatkan kinerja Polri, antara lain dengan mereorganisasi struktur organisasi Polri, penyederhanaan kejuruan dan kepangkatan dan sebagainya.

### WAWANCARA.

Lianausse, Yvette, Secretary, NY City Police Academy

Merre, Gorris, Kol. (Pol), Drs. Komandan Resimen Taruna Akademi Kepolisian

O'Hanlon, Brandon Patrick, Associate Director, Criminal Justice Center, John Jay College of Criminal Justice System, City University of New York

O'Keefe, James, Jr., Dr. Director of Training NY City Police Academy

Silks, S. Deputy Inspector, NY City Police Academy

Spunt, Barry, Ph.D. Associate Professor John Jay College of Criminal Justice, City University of New York

Supriyadi, Mayjen (Pol), Drs. Gubernur Akademi Kepolisian.

### DAFTAR PUSTAKA

1999, Naskah Kesiapan Kurikulum Akademi Kepolisian Tahun Akademi 1999/2000 (Pola 2.1.2.1)

John Jay College 1999 *Booklet*

Koernarto 1997. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Laboratorium Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UI, 1996. "Ringkasan Survei Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi" dalam A. Meliala (peny.) *Quo Vadis Polisi*, Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP – UI & Majalah Forum Keadilan.

New York City Police Akademy, 1999, *Booklet*

New York State Police Akademy, 1999, *Booklet*

Pamuji, Rivolinggo, 1997, *Sumber-sumber Stres pada Taruna Akademi Kepolisian*, Skripsi, Depok, Fakultas Psikologi - UI.

Sarwono, S.W. 1996, "Beban Mental Polri" dalam A. Meliala (peny.) *Quo Vadis Polisi*, Jakarta, Jurusan Kriminologi FISIP - UI & Majalah Forum Keadilan.

Sarwono, S.W., A. Meliala dan A. Parsudi, 1999 "Catatan Untuk Kapolri", Laporan Penelitian di Akpol, tidak dipublikasikan.

